

Pembangunan IKN dalam perspektif aksiologi : Penilaian etik terhadap penggalian dan penerapan ilmu

Susmita Yuliana Santi¹, Siti Nabila², Faisal³

¹²³Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: susmitasant7705@gmail.com¹, siti2406nabila@gmail.com², faisal@pba.uin-malang.ac.id³

Kata Kunci:

Ibu kota negara, aksiologi, etik, penerapan ilmu, moral

Keywords:

National capital, axiology, ethics, application of science, morals

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menandai transformasi besar dalam lanskap geopolitik dan tata ruang nasional Indonesia. Kajian ini mengupas pembangunan IKN dari perspektif aksiologi, dengan fokus pada dimensi etika dan nilai-nilai dalam penggalian serta penerapan ilmu pengetahuan. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, artikel ini mengkaji sejauh mana aspek moral diperhatikan dalam pengambilan keputusan ilmiah, khususnya terkait dampak lingkungan, relokasi masyarakat adat, dan penggunaan teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dominasi pendekatan teknokratis berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistematis antara pertimbangan aksiologis dan kebijakan pembangunan agar IKN tidak hanya menjadi simbol modernitas, tetapi juga cerminan tanggung jawab etis ilmu pengetahuan dalam konteks pembangunan nasional.

ABSTRACT

The development of Indonesia's new capital, Nusantara (IKN), marks a major transformation in the country's geopolitical landscape and spatial planning. This study examines the IKN project through the lens of axiology, focusing on the ethical and value-based dimensions of knowledge production and application. Using a qualitative-descriptive approach, the article analyzes the extent to which moral considerations are taken into account in scientific decision-making, particularly regarding environmental impact, the relocation of Indigenous communities, and the use of technology. The findings indicate that a technocratic approach tends to dominate, potentially overlooking principles of social justice and ecological sustainability. Therefore, a systematic integration of axiological reflection into development policies is essential to ensure that IKN serves not only as a symbol of modernity but also as an embodiment of the ethical responsibility of science within the context of national development.

Pendahuluan

Perspektif Aksiologi adalah salah satu bidang filsafat yang berfokus pada nilai-nilai evaluasi. Aksiologi memiliki dua objek diskusi utama, Objeknya adalah Etika membahas perilaku manusia dari perspektif nilai-nilai yang baik dan buruk, atau benar dan salah. Selanjutnya, estetika membahas sesuatu dari perspektif Itu indah dan tidak layak. Ada dua jenis aksiologi. penggunaan pertama Secara teoritis berkontribusi pada pemikiran teoretis Kembangkan teori. Kegunaan yang kedua bersifat praktis atau bisa disebut aplikatif (Syafei, 2025). Atau juga, teori nilai dalam filsafat fokus pada aspek etika dan estetika. Etik, yang sering disebut sebagai filsafat moral sebagai disiplin dalam konteks filsafat, itu menilai kualitas dan keburukan berdasarkan perilaku manusia yang dipahami

secara rasional. Konsep ini jelas mencerminkan nilai-nilai positif masyarakat (Mursyida et al., 2024).

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan kebijakan monumental yang dijalankan pemerintah Indonesia dengan dalih pemerataan pembangunan dan dekompresi beban Jakarta sebagai pusat politik dan ekonomi nasional. Menurut Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019, perpindahan IKN adalah langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang lebih Indonesia-sentris dan berkeadilan. Proyek ini kemudian diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dinamika wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia tidak hanya mencerminkan aspek pembangunan fisik, tetapi juga memunculkan beragam respons publik yang dapat ditelusuri melalui media sosial. Dalam hal ini, (Fachreza & Destra, 2023) menunjukkan bahwa analisis sentimen masyarakat di Twitter dengan metode *Naïve Bayes* mampu mengklasifikasikan kecenderungan opini publik terhadap kebijakan tersebut, baik yang bersifat positif, negatif, maupun netral. Di sisi lain, diskusi mengenai pembangunan IKN juga diwarnai oleh berbagai polemik multidimensional, mulai dari persoalan lingkungan, konflik agraria dengan masyarakat adat, hingga isu keberlanjutan sosial. (Firnaherera & Lazuardi, 2022) mengungkapkan bahwa proyek IKN berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat akibat belum kuatnya pengakuan formal serta terbatasnya ruang partisipasi publik. Pandangan tersebut diperkuat oleh Mahaswa et al. (2024) yang menyoroti adanya ketimpangan sosio-spasial serta dominasi simbolik politik dalam narasi pembangunan IKN.

Secara filosofis, pendekatan aksiologi—yang membahas nilai, etika, dan tujuan dari ilmu pengetahuan—menjadi penting untuk mengevaluasi apakah proyek sebesar IKN benar-benar dijalankan atas dasar nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. (Heri & Abdi, 2022) menunjukkan bahwa pembangunan IKN belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti keadilan antargenerasi dan perlindungan hayati, meskipun menggunakan label “*green city*” atau “*smart city*”.

Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan tidak dapat berdiri netral. Menurut filsuf ilmu Edward Teller, “*The science of today is the technology of tomorrow,*” tetapi etika harus memastikan bahwa teknologi tersebut tidak menjadi alat penindasan atau kerusakan. (Rawls, 2001) juga menekankan bahwa keadilan adalah nilai fundamental dalam semua bentuk institusi sosial, dan bahwa lembaga yang tidak adil—meski efisien—harus direformasi atau bahkan dibubarkan.

Secara Geopolitik mencakup penelitian tentang masalah geografis, sejarah, dan Ilmu Sosial dalam Konteks Politik Internasional di setiap wilayah. Negara tidak bisa mencapai semua kesempurnaan dalam setiap hal. Keadaan negara itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan geografis. Pentingnya setiap wilayah memiliki dampak besar terhadap suatu negara sehingga mereka tidak dapat di sepelekan. Dan tujuan pembangunan IKN adalah untuk menciptakan ibu kota baru yang berorientasi pada teknologi, efisien, dan berkelanjutan (Faslah, 2024).

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menelaah pembangunan IKN dalam perspektif aksiologi, guna menilai secara kritis dimensi etik dalam proses penggalan dan

penerapan ilmu pengetahuan yang menyertainya. Melalui pendekatan ini, diharapkan pembangunan IKN dapat diarahkan tidak hanya menjadi simbol modernitas, tetapi juga menjadi refleksi dari tanggung jawab etis ilmu dalam membangun bangsa.

Pembahasan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek besar yang menggabungkan berbagai ilmu terapan: dari teknik sipil, tata kota, lingkungan hidup, hingga ilmu sosial-politik. Namun demikian, jika ditelaah dari perspektif aksiologi—yakni filsafat tentang nilai dan etika dalam ilmu—muncul pertanyaan fundamental: apakah ilmu yang digunakan dalam proyek ini benar-benar berpihak pada kemaslahatan manusia dan alam?

Dominasi Pendekatan Teknosentris dan Risiko Etis

Pemerintah mengusung konsep *smart city*, *green city*, dan *sustainable city* dalam proyek IKN. Akan tetapi, sebagaimana diungkap oleh (Heri & Abdi, 2022), banyak prinsip pembangunan berkelanjutan yang belum sepenuhnya diterapkan—misalnya prinsip keadilan antargenerasi, perlindungan biodiversitas, dan internalisasi biaya lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan yang diterapkan lebih condong pada nilai instrumental (*tool-based knowledge*), bukan nilai intrinsik (*value-based knowledge*).

Dalam paradigma aksiologi, pendekatan ini rawan melupakan dimensi etis. Seperti dikemukakan oleh (Potter, 1971) dalam konsep *bioetika*, ilmu pengetahuan harus membawa nilai keberlanjutan kehidupan, bukan sekadar efisiensi teknis.

Masalah Etika Sosial: Ketimpangan dan Marginalisasi

Dari sisi sosial, pembangunan IKN menimbulkan polemik terkait hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan kajian (Firnaherera & Lazuardi, 2022), banyak komunitas adat di kawasan Sepaku dan sekitarnya belum mendapatkan kejelasan hukum atas lahan yang telah mereka tempati secara turun-temurun. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh (Rawls, 2001), bahwa kebijakan publik harus menguntungkan kelompok paling rentan.

Persoalan Etika Lingkungan dan Krisis Ekologis

IKN dibangun di tengah kawasan ekosistem tropis yang sangat kaya. Namun, seperti dijelaskan dalam laporan (Mahaswa et al., 2024), pembangunan ini membuka peluang besar terhadap deforestasi, degradasi ekologis, dan eksploitasi sumber daya alam. Dalam hal ini, penerapan ilmu lingkungan harus tunduk pada prinsip *precautionary* (pencegahan dini) dan etika tanggung jawab jangka panjang.

Nilai aksiologis dari ilmu ekologi adalah melindungi sistem kehidupan bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Kegagalan dalam mempertimbangkan nilai ini dapat mengarah pada bentuk baru kolonialisme ekologis, di mana pembangunan menyamar sebagai kemajuan, namun justru merusak habitat dan menggeser keanekaragaman hayati.

Krisis Partisipasi Ilmiah dan Publik

Sebagaimana diungkapkan oleh (Syahriar & Khairunnisah, 2022), proses pembangunan IKN masih lemah dalam menjamin partisipasi masyarakat secara substantif. Padahal, dalam sistem demokrasi, ilmu tidak bisa dilepaskan dari kontrol sosial. Menurut pandangan aksiologis, partisipasi publik bukan sekadar pelengkap prosedur, tetapi bagian dari nilai-nilai etik yang menjamin ilmu tidak disalahgunakan demi kepentingan segelintir elite.

Ilmu pengetahuan yang tertutup, apatis terhadap suara masyarakat, dan tidak inklusif berpotensi bergeser dari fungsi utamanya sebagai sarana pencarian kebenaran menjadi instrumen dominasi yang menguntungkan kelompok tertentu (Nugroho et al., 2023). Ketika proses produksi pengetahuan tidak melibatkan partisipasi publik dan mengabaikan keberagaman perspektif, maka kebijakan yang dihasilkan rentan kehilangan legitimasi sosial serta tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Dalam konteks pembangunan IKN, kondisi tersebut dapat memicu ketimpangan, konflik kepentingan, hingga resistensi dari berbagai pihak yang merasa tidak terakomodasi.

Oleh karena itu, kejujuran ilmiah dan transparansi kebijakan harus dijadikan standar etis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Keterbukaan data, akuntabilitas pengambilan keputusan, serta pelibatan masyarakat secara aktif menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan secara adil, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama, bukan sekadar kepentingan segelintir pihak. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat berfungsi sebagai alat emansipasi yang mendorong kesejahteraan kolektif, bukan sebagai sarana legitimasi kekuasaan.

Kesimpulan dan Saran

Menurut aksiologi, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak hanya penting untuk mencapai tujuan fisik, tetapi juga harus dinilai berdasarkan prinsip moral dan kemanusiaan. Dari sudut pandang aksiologi, penerapan ilmu dalam pembangunan IKN harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak masyarakat lokal dan adat. Pembangunan IKN harus dilandasi oleh nilai-nilai aksiologis yang mengutamakan kemiskinan dan keadilan sosial, serta etika pembangunan yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan dan standar ilmu, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan keseimbangan sosial dan ekologis yang berkelanjutan, tetapi juga kemajuan material.

Untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga sosial dan ekologis, nilai dan tujuan pembangunan harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial, keberagaman, dan petualangan. Dampak sosial dan lingkungan, termasuk mencegah marginalisasi dan komodifikasi alam yang tidak etis, harus menjadi bagian dari penilaian etik kesejahteraan dan standar ilmu. Pembangunan: Agar hasil pembangunan adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan aksiologis, pengambilan keputusan tentang

pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan rasional dan transparan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) harus dipadukan dengan rencana kota cerdas dan berkelanjutan agar kota menjadi inklusif, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial. Agar pembangunan IKN tidak menimbulkan ketimpangan baru, pembangunan harus mempertimbangkan redistribusi sosio-spasial.

Daftar Pustaka

- Fachreza, M., & Destra, R. (2023). Klasifikasi sentimen masyarakat terhadap proses pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia pada media sosial twitter menggunakan Metode Naive Bayes [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://repository.uin-malang.ac.id/19328/>
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71–84. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84>
- Heri, M., & Abdi, N. S. (2022). Aspek Yuridis Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru Negara Indonesia di Kalimantan Timur dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(2), 89–106.
- Mahaswa, R. K., Murtiningsih, S., & Panuntun, A. B. (2024). Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Redistribusi Sosiospasial: Perspektif Geografi Kritis. *Masyarakat Indonesia*, 50(2), 187–208.
- Mursyida, R., Soleh, A. K., & Al Hashas, M. N. (2024). Studi Analisis Aksiologi Pesantren: Eksplorasi Nilai-Nilai Etika dan Estetika Santri. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 5(3), 1022–1034. <http://repository.uin-malang.ac.id/23229/>
- Nugroho, H., Widyanta, A. B., Wibawanto, G. R., & Fitramadhana, R. (2023). Proliferasi pemikiran sosial kritis. PT Kanisius.
- Potter, V. R. (1971). *Bioethics: Bridge to the future*.
- Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Harvard University Press.
- Syafei, I. (2025). *Filsafat Ilmu*. Penerbit Widina.
- Syahriar, I., & Khairunnisah, K. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara: Di Tinjau Dari Partisipasi Publik dan Pengaturan Tata Ruang. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(10), 2352. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.10.p13>